

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional. (2007). Peraturan Kepala BPN nomor 03 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres RI nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1997). Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Nomor 036/T/BM/1997.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2004). Pt.T-01-2002-B, Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2004). Pd.T-19-2004-B, Pedoman Pencacahan Lalulintas.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2005). Pd.T-19-2005-B Pedoman Konstruksi dan Bangunan mengenai Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. (2009). Pedoman 008/BM/2009 - Pedoman Konstruksi & Bangunan - Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 Tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR no.21/SE/Db/2023 tentang Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI).
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Pekerjaan Umum. (2006). Pedoman 08/BM/05 - Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2011). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (dan Lampiran).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor nomor 03/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no. 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372.

Kementerian Perhubungan. (2006). Keputusan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Kementerian Perhubungan. (2015). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 75 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalulintas.

Kementerian Perhubungan. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan No 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Kementerian Perhubungan. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Kementerian Lingkungan Hidup. (2006). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.

Kementerian Perhubungan. (2010). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113.

Kementerian Pekerjaan Umum. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang PU yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat nomor 248 tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2020). Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 35 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat nomor 290 tahun 2015 Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2008). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2012). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2020). Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2020). Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Lembaran Negara RI tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara RI no.3952.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

[UPM]. (tanpa tahun). SOP/UPM/GJBM-135, Prosedur Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Studi/FS) Pembangunan Jalan.

